

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aksinuddin, Saim (2022), *Hukum Pertanahan: Mengurai Kompleksitas Problem Pertanahan Indonesia*, Malang: Inteligensia Media (Intrans Publishing Group).
- Arba, H.M (2019), *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aryatie, Retno, dkk (2022), *Pemahaman Seputar Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Bakri, Muhammad (2013), *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2: Pembidangan dan Asas-Asas Hukum*, Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Efendi, Jonaedi, dkk (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Kencana,.
- Handayani, Dwi, dkk (2022), *Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Tasikmalaya: Edu Publisher, 2022.
- Hermit, Herman (2004), *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda : teori dan praktek pendaftaran tanah di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2004.

- Iskandar, Mudakir (2019), *Panduan Mengurus Sertipikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019.
- Kusdarini, Eny (2020), *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Mertokusumo, Soedikno (2010), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010.
- Ramadhani, Rahmat (2024), *Buku Ajara Hukum Pertanahan*, Sumatera: Umsu Press, 2024.
- Ramadhani, Rahmat (2022), *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*, Sumatera: Umsu Press, 2022
- Rezah, Farah (2018), *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Sangadji, Z.A (2003), *Kompetensi Badan Umum Peradilan Dan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Gugatan Pembatalan Sertipikat Tanah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Santoso, Urip (2017), *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, Depok: Kencana, 2017.
- Santoso, Urip, 2010, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Santoso, Urip, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Santoso, Urip (2017), *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sihombing, Romi (2022), *Cacat Administrasi Pembatalan Sertipikat Tanah Oleh BPN Tanpa Putusan Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Soerodjo, Irwan (2003). *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2003.
- Supriadi (2023). *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Sumardjono, Maria (2005), *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- Sutedi, Adrian (2011), *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Urip, Santoso (2015), *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Wahyuni, Sri, dkk (2022), *Pengantar Ilmu Hukum*, Makassar: CV. Tohar Media, 2022.
- Waskito, dkk (2017), *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Jakarta: Kencana, 2017.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan .

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Umum.

### **C. Sumber Lainnya**

Agung, G., Satya, D., Ketut, P. I., & Sudarsana, S. (n.d.). *KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN BIDANG TANAH.*

Akses Publik Aldys, H., Al-Qisthas, F., Rismelin Alrasyid, A., & Ulfatun Najicha, F. (n.d.). *HAK AKSES PUBLIK TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH.*

Aldila Rajab, R., Eko Turisno, B., & Doramia Lumbanraja Program Studi Magister Kenotariatan, A. (2020). *SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH. NOTARIUS, 13.*

- Atikah, N., & Kenotariatan, M. (2022). *NoLaJ Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*. *1*, 263–289.  
<https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>
- Badan, O., Nasional, P., Putusan, B., Tata, P., Negara, U., Apriani, R., & Rais Asmar, A. (n.d.-b). PELAKSANAAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH. In *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*.
- Gideon, M., Ngongoloy, V., Pinasang, D. R., & Lowing, N. S. (n.d.). *KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN BERDASARKAN PP NOMOR 18 TAHUN 2021 1 Oleh*.
- Kepemilikan, & Hak, T. (n.d.). *KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA*.  
<http://els.bappenas.go.id/upload/other/Penyempurnaan%20UUPA%20dan%20Sinkronisasi%20Kebijakan.htm>,
- Kholis Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Kampus Unair, N. B., & Dharmawangsa Dalam Selatan, J. (2018). ASAS NON DISKRIMINASI DALAM CONTEMPT OF COURT. In *Nur Kholis Asas Non Diskriminasi dalam Contempt of Court Legality* (Vol. 26, Issue 2).
- Maufiroh, P., Renata Rachman, B., Purnaningrum, E., Kenotariatan, M., & Hukum Universitas Airlangga, F. (191 C.E.). *KAJIAN HUKUM*

*TERHADAP INKONSISTENSI VERTIKAL PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 18 TAHUN 2021.*

Mulyana Darusman, Y. (2017). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36–56. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>

Panah, J., Yang, K., Tinggi, S., Hukum, I., Selatan, N., Klaudius, O. :, Hulu, I., & Kunci, K. (2021a). *KEKUATAN ALAT BUKTI SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM BUKTI KEPEMILIKAN HAK* (Vol. 1, Issue 1).

Richart, O. :, & Runtuwene, A. E. (2019). KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH 1. In *Lex Et Societatis* (Issue 4).

Tanah, P., Langkah..., S., & Ramadhani, R. (n.d.-a). *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah*. <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/sosek>